

Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan di Kabupaten Bengkalis: Implikasi Pengawasan Anggaran Pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau

* Najwa Syahirah Usman¹, Mendra Wijaya²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : najwasyahirahusman@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan anggaran pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ketimpangan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan infrastruktur pendidikan yang terbatas menjadi masalah utama di daerah ini. Pengawasan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh DPRD memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksesuaian antara prioritas anggaran dan kebutuhan lokal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat memperbaiki distribusi anggaran pendidikan dan mengurangi ketimpangan akses, tetapi memerlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam merancang strategi pengawasan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya di daerah dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang kompleks seperti Kabupaten Bengkalis

Kata Kunci: Pengawasan Anggaran Pendidikan, DPRD, Ketimpangan Akses Pendidikan, Kabupaten Bengkalis

Abstract

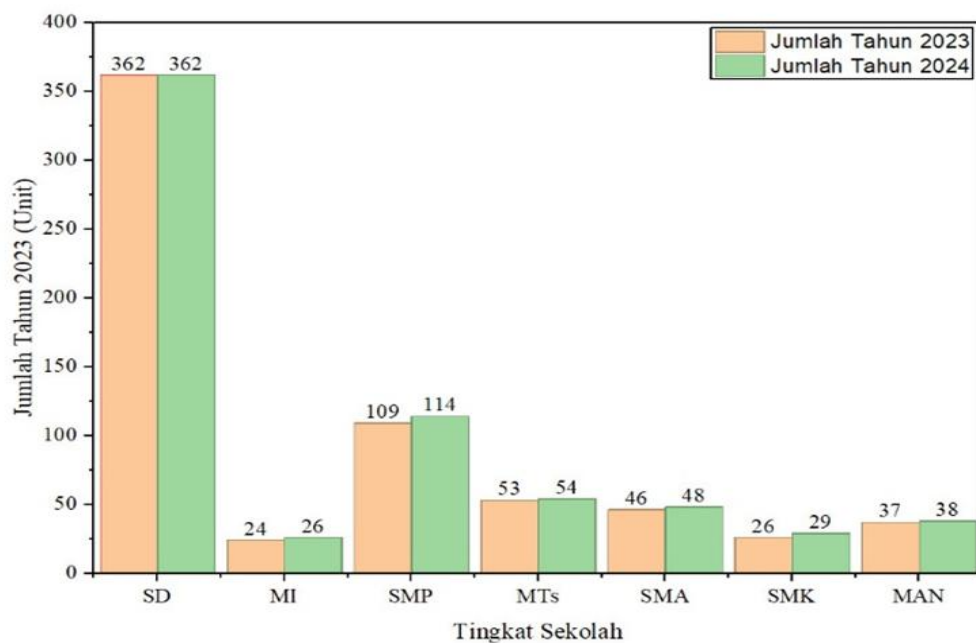
This study aims to analyze the role of the budget supervision of education by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Riau Province in addressing the educational access disparity in Bengkalis Regency. The educational access inequality, caused by geographical, socio-economic, and limited educational infrastructure factors, is a major issue in this region. The budget supervision conducted by DPRD has a significant impact on the quality of education; however, there are still challenges in its implementation, such as misalignment between budget priorities and local needs, as well as limited human resource capacity. This research employs a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observations, and literature studies as data collection techniques. The findings show that effective supervision can improve the distribution of education funds and reduce access disparity, but it requires enhanced transparency, accountability, and coordination between agencies. This study is expected to contribute to designing more effective and sustainable education budget supervision strategies, particularly in areas with complex geographical and socio-economic conditions, such as Bengkalis Regency.

Keywords: Education budget supervision, DPRD, Educational access disparity, Bengkalis Regency.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara global, pendidikan menjadi pilar utama dalam upaya memperbaiki kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas (Ramadhani & Rahayu, 2021). Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam sistem pemerintahan, pemerintah daerah kini memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola dan mengawasi sektor pendidikan di wilayah masing-masing, termasuk pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai (Ranggakusumah et al., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi, seperti Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2024
Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkalis, 2024

Kesenjangan dalam akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis menjadi isu yang mendesak, mengingat kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau terpisah oleh perairan, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan dan implementasi anggaran tersebut seringkali tidak optimal, yang mengakibatkan ketidakmerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik yang tidak tersebar merata, dan kualitas pendidikan yang bervariasi antar wilayah (Dimmera, Bella Ghia; Purnasari, 2020). Pengawasan terhadap anggaran pendidikan, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengawasan anggaran pendidikan dapat mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Pengawasan oleh DPRD menjadi penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga terealisasi sesuai dengan peruntukannya. Teori akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak yang diberi wewenang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, sedangkan transparansi mengarah pada akses terbuka terhadap informasi pengelolaan anggaran yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Pengawasan ini juga melibatkan partisipasi publik yang semakin berkembang di era digital, di mana masyarakat, media, dan LSM memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keduanya, akuntabilitas dan transparansi, memiliki keterkaitan erat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran pendidikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Bengkalis.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis dapat dipahami melalui analisis ketidakmerataan distribusi pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis, sosial, dan geografis, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat dipengaruhi oleh perbedaan sosial-ekonomi dan latar belakang sekolah siswa, yang berkontribusi pada kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah (Valencia-garcia et al., 2025). Di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Bengkalis, ketimpangan ini sering kali dipengaruhi oleh infrastruktur yang terbatas, kendala ekonomi, dan kurangnya perhatian terhadap kelompok marginal, seperti yang dijelaskan oleh Hossain, dalam konteks anak-anak dari keluarga pekerja seks (Rimba et al., 2025). Selain itu pentingnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan akses pendidikan, di mana tingkat pemberdayaan yang rendah berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, terutama di wilayah yang lebih miskin atau terpinggirkan (Gaventa & Mcgee, 2013). Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau, peran legislatif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan disalurkan secara merata, dengan memperhatikan ketimpangan yang ada di daerah-daerah marginal. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk mengurangi ketimpangan ini, (Gaventa & Mcgee, 2013) dengan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana dampak pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi berbagai aktor dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam pengawasan anggaran pendidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan anggaran pendidikan di daerah dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang khas seperti Kabupaten Bengkalis.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengawasan anggaran pendidikan dapat mengatasi ketimpangan akses pendidikan di daerah kepulauan. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang pengawasan anggaran pendidikan dengan fokus pada konteks lokal di Indonesia, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, terutama dalam merancang strategi pengawasan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang akuntabilitas publik dan pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami fenomena pengawasan anggaran pendidikan di Kabupaten Bengkalis dari perspektif berbagai aktor yang terlibat, termasuk DPRD, pejabat dinas pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat tercermin dalam pendekatan kuantitatif yang berbasis pada angka dan statistik (Wijaya et al., 2025)). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan anggaran pendidikan dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis, tanpa adanya upaya untuk mengubah atau memanipulasi variabel-variabel yang diteliti (Alhasnawi et al., 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan pengawasan anggaran pendidikan, melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Bengkalis, kepala sekolah, serta masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sumber data sekunder mencakup literatur yang relevan, seperti laporan pemerintahan, dokumen anggaran, serta penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa (Creswell, 2024). Dokumen sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks lebih dalam mengenai kebijakan anggaran pendidikan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel sesuai dengan konteks yang ada, serta memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka (Sarief, 2023). Observasi dilakukan di lapangan untuk mengamati dinamika pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD, termasuk pertemuan atau rapat yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Teknik observasi ini penting untuk memahami bagaimana proses pengawasan berlangsung dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran pendidikan dan laporan pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Bengkalis, seperti dokumen APBD, laporan keuangan, dan dokumen kebijakan pendidikan dari Dinas Pendidikan. Selain itu, studi literatur akan dilakukan untuk memperkaya kajian dengan teori-teori yang relevan dan penelitian sebelumnya mengenai pengawasan anggaran pendidikan dan akuntabilitas public (Wijaya, Isa, et al., 2024).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Unit analisis ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam bagaimana proses pengawasan dilaksanakan oleh DPRD dan bagaimana pengawasan tersebut mempengaruhi pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut. Subjek penelitian mencakup berbagai aktor yang terlibat dalam proses pengawasan, seperti anggota DPRD, pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, serta masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pendidikan dan pengawasan anggaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan pendekatan sintesis naratif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti (Wijaya, Chusna, et al., 2024). Setelah tema-tema utama diidentifikasi, peneliti akan menyusun

sintesis naratif untuk menjelaskan hasil analisis secara menyeluruh, dengan menghubungkan temuan-temuan yang ditemukan dalam data dengan teori dan literatur yang relevan. Sintesis naratif ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pengawasan anggaran pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan mengkaji makna sosial, politik, dan ekonomi yang terkandung dalam proses pengawasan anggaran dan kebijakan pendidikan (Hafidzh, 2024) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengawasan anggaran pendidikan di daerah yang memiliki kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang kompleks, seperti Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau memiliki implikasi signifikan terhadap ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Studi menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi anggaran pendidikan seringkali disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara prioritas anggaran dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal, khususnya pada daerah-daerah terpencil. Peningkatan pengawasan anggaran dapat memperbaiki efisiensi pengeluaran publik dengan mengurangi bias anggaran yang lebih mengutamakan infrastruktur ketimbang kebutuhan dasar pendidikan (Zhang & Yuan, 2023). Di sisi lain, adanya perbedaan dalam tingkat desentralisasi anggaran juga mempengaruhi efektivitas pengawasan oleh DPRD, di mana daerah dengan mekanisme pengawasan yang lebih terpusat cenderung memiliki kontrol lebih baik terhadap penggunaan dana pendidikan (Kessy, 2023). Selain itu, model penganggaran berbasis kinerja, seperti yang direkomendasikan oleh DPRD untuk meningkatkan transparansi, dapat mengurangi ketimpangan akses dengan memastikan alokasi dana lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang paling membutuhkan (Damaševičius, 2025). Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan anggaran yang lebih responsif terhadap kondisi lokal dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah di Kabupaten Bengkalis.

Ketimpangan Akses Pendidikan Berdasarkan Latar Belakang Sekolah

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis juga dipengaruhi oleh latar belakang sekolah asal siswa, baik yang berkaitan dengan jenis sekolah maupun kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut. Dalam konteks ini, latar belakang sekolah mencakup perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, yang sering kali memiliki perbedaan dalam hal kualitas fasilitas, kurikulum, serta ketersediaan sumber daya pengajaran. Sekolah negeri, yang umumnya lebih banyak tersedia di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya pengajaran, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sebaliknya, sekolah swasta yang lebih banyak tersebar di kawasan perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, meskipun aksesnya terbatas bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan (Hossain et al., 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses ke sekolah swasta yang lebih berkualitas cenderung memperburuk ketimpangan pendidikan, terutama di kalangan kelompok-kelompok miskin dan marginal.

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/ Sederajat	99,15	98,35	107,49	103,01
SMP/MTs/ Sederajat	84,75	85,92	98,22	93,09
SMA, SMK/MA Sederajat	65,28	69,99	81,14	93,13

Sumber : Bengkalis Dalam Angka, 2025

Selain itu, perbedaan latar belakang sekolah juga tercermin dalam tingkat pendidikan orang tua siswa. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas ke sekolah berkualitas, karena faktor keterbatasan informasi dan kemampuan ekonomi keluarga dalam memilihkan sekolah yang lebih baik. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih terpencil sering kali hanya menyediakan pendidikan dasar tanpa fasilitas pendukung yang memadai, sehingga mempersulit siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas lebih tinggi, seperti pendidikan menengah dan lanjutan. Penelitian oleh (Espinosa et al., 2025) mengungkapkan bahwa kesenjangan dalam latar belakang pendidikan orang tua berhubungan erat dengan akses anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik, karena orang tua yang lebih berpendidikan cenderung lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan lebih mampu memfasilitasi akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Selain itu, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang ada di setiap sekolah. Sekolah negeri yang sering kali kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah-daerah tertentu, berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang biasanya mampu menarik tenaga pengajar yang lebih terampil berkat dana yang lebih besar dan insentif yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat siswa yang bersekolah di sekolah negeri, terutama di daerah yang lebih terpencil, memiliki keterbatasan dalam hal pengajaran yang berkualitas, yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar mereka. (Frola et al., 2024) menyoroti pentingnya kualitas pengajaran dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan, dengan menunjukkan bahwa tingkat keahlian guru yang lebih tinggi dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan hasil pendidikan bagi siswa dari latar belakang yang kurang beruntung.

Dengan demikian, ketimpangan akses pendidikan berdasarkan latar belakang sekolah menciptakan suatu siklus ketidaksetaraan yang memperburuk ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bersekolah di sekolah negeri dengan sumber daya terbatas sering kali terjebak dalam kondisi pendidikan yang tidak optimal, yang menghambat mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk memperhatikan aspek latar belakang sekolah ini dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata, guna mengurangi ketimpangan pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.

Dampak Ketimpangan Akses Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Ketika akses ke pendidikan berkualitas tidak merata, hal ini menciptakan disparitas dalam penguasaan materi dan keterampilan antara siswa yang berasal dari daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa yang tinggal di daerah pedesaan, yang sering kali memiliki akses terbatas ke sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, sering kali berhadapan dengan kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti buku, laboratorium, serta akses internet yang dapat mendukung proses pembelajaran. Penelitian oleh (Hossain et al., 2025) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah dengan akses terbatas sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas tersebut, yang menyebabkan hasil pendidikan yang tidak optimal.

Tabel 2. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer serta Mengakses Internet di Kabupaten Bengkalis, 2024

Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
Laki-laki	82,52	9,18	76,01
Perempuan	80,86	10,47	73,71
Laki-laki dan Perempuan	81,70	9,82	74,86

Sumber : Bengkalis Dalam Angka, 2025

Selain itu, ketimpangan akses pendidikan juga mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kualitas pengajaran yang diterima oleh siswa. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan akses terbatas sering kali kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini terutama terjadi pada sekolah negeri yang berada di daerah dengan sumber daya yang terbatas, sehingga mengurangi kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang lebih mudah diakses oleh siswa cenderung memiliki tenaga pengajar yang lebih berkualitas dan berpengalaman, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Menurut (Frola et al., 2024), perbedaan kualitas pengajaran ini berkontribusi pada ketimpangan dalam pencapaian akademik di antara siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, dengan siswa dari daerah kurang terlayani sering kali mengalami penurunan kualitas pendidikan.

Selain pengaruh terhadap kualitas pengajaran, ketimpangan akses pendidikan juga berdampak pada kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di daerah dengan akses terbatas, banyak siswa yang terpaksa berhenti pada tingkat pendidikan dasar atau menengah karena terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia, serta kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam partisipasi pendidikan tinggi antara siswa dari keluarga mampu dan keluarga kurang mampu, yang pada gilirannya menghambat mobilitas sosial dan ekonomi mereka. (Valencia-garcia et al., 2025) mengungkapkan bahwa siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan menengah dan tinggi cenderung terhambat dalam pengembangan keterampilan yang lebih kompleks, yang pada akhirnya membatasi potensi mereka dalam dunia kerja dan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi.

Dampak lebih lanjut dari ketimpangan akses pendidikan ini adalah ketidakmampuan siswa untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketika akses pendidikan terbatas pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan terhenti pada tahap awal pendidikan menengah, siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional yang sangat dibutuhkan di pasar kerja. Akibatnya, mereka tidak dapat bersaing dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang lebih baik yang memiliki akses lebih besar ke pelatihan lanjutan dan pendidikan keterampilan. Penelitian oleh (Hossain et al., 2025) juga menyoroti bahwa ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan terbatasnya pilihan karier bagi siswa, yang dapat mengarah pada tingginya tingkat pengangguran atau keterbatasan dalam penghasilan mereka di masa depan.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Ketidaksetaraan dalam fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, dan kesempatan melanjutkan pendidikan memperburuk kualitas pendidikan secara keseluruhan dan membatasi potensi perkembangan siswa. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk mengurangi ketimpangan ini, memastikan bahwa setiap siswa, tanpa memandang latar belakang geografis atau sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pengawasan Anggaran Pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau

Pengawasan anggaran pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memainkan peranan vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Pendidikan (Rahmadhani & Febrian, 2025). Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya alokasi dana untuk sektor pendidikan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Ismail et al., 2025). Dalam praktiknya, pengawasan ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pengawasan langsung, yang melibatkan kunjungan lapangan dan evaluasi terhadap proyek pendidikan yang dibiayai, serta pengawasan tidak langsung, seperti analisis laporan keuangan dan rekomendasi dalam rapat kerja antara DPRD dan eksekutif. Namun, meskipun sudah ada upaya yang signifikan dalam pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya, antara lain koordinasi yang lemah antara DPRD dan Perangkat Daerah, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusiadi DPRD yang mempengaruhi kualitas pengawasan (Hafidzh, 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan anggaran pendidikan yang diterima oleh DPRD, yang seringkali tidak disajikan secara rinci (Ferryono et al., 2022). Hal ini menghambat proses evaluasi yang mendalam terhadap penggunaan dana dan efektivitas program pendidikan yang dijalankan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas DPRD dalam hal pengawasan anggaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang lebih maju dan terintegrasi dapat mempermudah DPRD dalam memantau pelaksanaan anggaran secara real-time, sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, untuk mencapai pengawasan anggaran pendidikan yang lebih optimal, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif, serta peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif.

Pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau menjadi aspek yang krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dalam konteks desentralisasi, pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif, sehingga

dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di sekolah (Dian Mega Handi , Zulwisman, 2024). Fungsi pengawasan DPRD, sebagai bagian dari mekanisme check and balances dalam pemerintahan daerah, tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan tetapi juga pada penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Pendidikan (Nadiva Salsabilla Azzara, Dewi Anggraini, 2025). Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, faktor pengawasan yang tidak optimal, seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD, termasuk peran serta masyarakat dalam memantau penggunaan dana pendidikan, sangat penting agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan partisipasi publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Riau.

SIMPULAN

Dalam Penelitian ini mengeksplorasi peran pengawasan anggaran pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya pengawasan anggaran pendidikan, implementasi pengawasan yang efektif masih terhambat oleh berbagai tantangan. Ketidakterdistribusi anggaran, ketidaksesuaian antara prioritas anggaran dan kebutuhan lokal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di DPRD menjadi kendala utama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung memang menunjukkan adanya perbaikan, namun tantangan seperti kurangnya transparansi laporan anggaran dan koordinasi antar instansi masih mempengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran pendidikan, diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan pemanfaatan teknologi informasi dalam memantau penggunaan anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan infrastruktur pendidikan yang terbatas, memperburuk ketidakmerataan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kawasan perkotaan. Keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, dan rendahnya kesempatan bagi siswa di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar. Pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau memiliki peran penting dalam memperbaiki distribusi dana dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Untuk itu, penguatan pengawasan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan, terutama dalam mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasnawi, M. Y., Mohd Said, R., Mat Daud, Z., & Muhammad, H. (2023). Enhancing managerial performance through budget participation: Insights from a two-stage A PLS-SEM and artificial neural network approach (ANN). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100161>
- Creswell, John W. (2024). My 35 Years in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 18(3), 203–215. <https://doi.org/10.1177/15586898241253892>
- Damaševičius, R. (2025). Reconceptualizing education in the Stakeholder era : A futures perspective. *Sustainable Futures*, 10(September), 101515. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101515>



- Dian Mega Handi , Zulwisman, G. (2024). *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* Dian Mega Handi , Zulwisman , Gusliana Hb Universitas Riau , Riau Indonesia *PEDAHULUAN Indo.* 10(3), 976–986.
- Dimmera, Bella Ghia; Purnasari, P. D. (2020). Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *SEBATIK*, 24(2).
- Espinosa, O., Bejarano, V., Arias, M. L., & González, J. I. (2025). Informal workers in the rural sector in Colombia: Living conditions and social security. *Regional Science Policy and Practice*, 17(8). <https://doi.org/10.1016/j.rssp.2025.100200>
- Ferryono, B., Pudjihardjo, M., & Prasetyia, F. (2022). *The Impact of Financial Accountability , Internal Control and Government Expenditure on Social Welfare.* 5(2), 116–127.
- Frola, A., Delprato, M., & Chudgar, A. (2024). International Journal of Educational Development Lack of educational access , women ' s empowerment and spatial education inequality for the Eastern and Western Africa regions. *International Journal of Educational Development*, 104(July 2023), 102939. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102939>
- Gaventa, J., & Mcgee, R. (2013). The Impact of Transparency and Accountability Initiatives. *Development Policy Review*, 31.
- Hafidzh, F. A. (2024). *Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* 6(5), 1363–1373.
- Hossain, S., Chakrabarty, P., Bain, K., & Uz, M. (2025). International Journal of Educational Research Open Access to education of the children of the sex workers in Banishanta : Laws and reality. *International Journal of Educational Research Open*, 9(October), 100533. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100533>
- Ismail, A., W, D. P., & Fatah, Z. (2025). *Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang Utara Besar Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia.* 3(September).
- Kessy, A. T. (2023). Social Sciences & Humanities Open Decentralization and administrative discretion in Tanzania : An analysis of administrative discretion on human resources , finance and service delivery. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100684. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100684>
- Nadiva Salsabilla Azzara, Dewi Anggraini, A. Z. (2025). *Jurnal Pembangunan Nagari.* 10(1), 62–77. <https://doi.org/10.30559/jpn.v10i1.518>
- Rahmadhani, N., & Febrian, R. A. (2025). *Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024.* 3(17).
- Ranggakusumah, R. A., Suryadi, & Suryana, A. (2024). Pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPR Komisi V) terhadap kebijakan pendidikan. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 8(2), 1–10.
- Rimba, A. B., Sato, I., & Endo, K. (2025). Environmental and Sustainability Indicators Localization and its impact on achieving SDGs and transitioning to post-SDGs in Indonesia. *Environmental and Sustainability Indicators*, 28(April), 100926. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100926>
- Sarie. (2023). Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian. In *Rake Sarasin* (Issue Juli).
- Valencia-garcia, M. C., Villa-garzon, F. A., & Branch-bedoya, J. W. (2025). *Dataset on higher education access and population distribution in seven campuses in Colombia.* 63. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112191>

- Wijaya, M., Chusna, C. A., Hatchi, I., & Arafat. (2024). *Metode Campuran dalam Penelitian : Menggabungkan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Wijaya, M., Isa, R., Setyawati, D. M., & Ramadhan, S. (2024). *Ilmu Pemerintahan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan* (Vol. 1). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=DtOb4BAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=DtOb4BAAAAAJ:0aBXIfxlw9sC%0A
https://www.researchgate.net/publication/382219455_ILMU_PEMERINTAHAN_INOVASI_DALAM_TATA_KELOLA_PEMERINTA
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian : Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methods* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Zhang, L., & Yuan, W. (2023). Heliyon Can local People ' s Congress supervision improve the expenditure behavior of local governments? Evidence from provincial budget review. *Heliyon*, 9(12), e22395. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22395>

